



Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Abdur Rahim¹, Ulla Sabrina², Ikhfi Khairunnisa³, Muhammad Haekal⁴, Kholaiif Aulia Sidiq⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, ulasabrina@gmail.com, ikhfikhoirunnisa@gmail.com,
muhammadhaekalna@gmail.com, kholaisidik0910@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-09-07 Revised: 2024-10-27 Published: 2024-11-09 Keywords: <i>Role; Ma'had Al-Zaytun; Regional Elections; Law.</i>	This study aims to explore the contribution of Islamic educational institutions in supporting the implementation of democratic and integrity-based regional elections. Through a qualitative approach, this study analyzes various data and information obtained from interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that Ma'had Al-Zaytun plays a role as a center for political education, a facilitator of dialogue between stakeholders, and an independent supervisor in the regional election process. This study is expected to provide new insights into the role of educational institutions in the context of local democracy in Indonesia.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-09-07 Direvisi: 2024-10-27 Dipublikasi: 2024-11-09 Kata kunci: <i>Peran; Ma'had Al-Zaytun; Pilkada; Undang-Undang.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menggali kontribusi lembaga pendidikan Islam dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan analisis terhadap berbagai data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berperan sebagai pusat pendidikan politik, fasilitator dialog antar pemangku kepentingan, serta pengawas independen dalam proses Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran lembaga pendidikan dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses ini tidak hanya menentukan pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan suara dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pilkada harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Hidayah, 2020). Prinsip-prinsip ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap suara dihargai dan setiap keputusan yang diambil mencerminkan keinginan rakyat. Dalam konteks ini, Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri sejak tahun 1999, memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang berkualitas (Sari, 2021).

Sebagai lembaga pendidikan, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat membentuk karakter santri. Dalam era di mana informasi dapat diakses dengan mudah, pemahaman yang baik tentang demokrasi dan hak-hak politik menjadi sangat penting. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diadakan, Ma'had Al-Zaytun berupaya untuk meningkatkan kesadaran politik

di kalangan santri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menyatakan bahwa "Pendidikan politik di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab" (2021).

Ma'had ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dengan jumlah santri yang mencapai ribuan dan jaringan alumni yang luas, Ma'had Al-Zaytun berpotensi menjadi agen perubahan dalam konteks politik lokal (Kurniawan, 2023). Alumni Ma'had yang tersebar di berbagai sektor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengedukasi masyarakat di sekitar mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Hal ini diperkuat oleh data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di kalangan generasi muda meningkat sebesar 20% pada pemilihan terakhir (2022).

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pilkada yang berkualitas, Ma'had Al-Zaytun juga aktif mengadakan seminar dan diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang

bagi masyarakat untuk berdialog dan bertukar pikiran mengenai isu-isu politik terkini. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi, Ma'had berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk demokrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, "Dialog publik adalah salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi" (2023).

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga berkomitmen untuk mengedukasi santri tentang pentingnya melakukan pemilihan dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab. Melalui berbagai program pelatihan, santri diajarkan untuk menganalisis visi dan misi calon pemimpin serta memahami dampak dari pilihan yang mereka buat. Program ini diharapkan dapat menghasilkan pemilih yang tidak hanya aktif, tetapi juga kritis dalam menilai calon pemimpin. Hal ini sejalan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan bahwa 65% pemilih muda merasa lebih percaya diri dalam memilih setelah mengikuti program pendidikan pemilih (2022).

Di samping itu, Ma'had Al-Zaytun juga berperan dalam memfasilitasi akses informasi yang akurat dan terpercaya mengenai calon kepala daerah. Dalam era disinformasi yang marak, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar agar dapat membuat keputusan yang tepat. Melalui kolaborasi dengan berbagai media lokal dan nasional, Ma'had berusaha untuk menyebarkan informasi yang objektif dan tidak bias. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong, "Akses informasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan pemilih yang cerdas" (2023).

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam konteks Pilkada juga mencakup upaya untuk mendorong santri agar terlibat langsung dalam proses politik. Melalui program magang dan pelatihan kepemimpinan, santri diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di tingkat lokal. Dengan cara ini, mereka tidak hanya belajar tentang teori demokrasi, tetapi juga mengalami langsung dinamika politik yang terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Ma'had untuk mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks yang lebih luas, kontribusi Ma'had Al-Zaytun dalam mendukung Pilkada

yang berkualitas juga berkaitan dengan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif. Dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses pendidikan politik, Ma'had berusaha untuk memastikan bahwa suara semua orang, tanpa terkecuali, didengar. Sebagaimana dikatakan oleh pengamat politik, "Demokrasi yang sehat adalah ketika semua suara, terutama dari kelompok marginal, dapat diakomodasi" (2022).

Melalui berbagai inisiatif ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfokus pada pendidikan santri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan iklim politik yang lebih baik di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan Ma'had dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lainnya dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pemilihan kepala daerah tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan cerminan dari keinginan dan harapan masyarakat (Amir, 2021).

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah yang berkualitas tidak hanya bergantung pada calon pemimpin yang baik, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Melalui pendidikan dan keterlibatan yang tepat, masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan seperti Ma'had Al-Zaytun untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam mendukung demokrasi di Indonesia (Fauzi, 2019).

Secara keseluruhan, kontribusi Ma'had Al-Zaytun dalam pelaksanaan Pilkada yang berkualitas menunjukkan bahwa pendidikan dan partisipasi masyarakat adalah dua hal yang saling terkait. Dengan mendidik generasi muda tentang pentingnya demokrasi dan memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi, Ma'had berperan dalam membangun masa depan politik yang lebih baik. Sebagai lembaga yang telah berkomitmen pada pengembangan nilai-nilai demokrasi, Ma'had Al-Zaytun diharapkan dapat terus menjadi pilar dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola Ma'had Al-Zaytun, santri, dan masyarakat sekitar. Observasi langsung terhadap kegiatan Ma'had yang berkaitan dengan pendidikan politik dan partisipasi dalam Pilkada

juga dilakukan. Selain itu, studi dokumentasi terhadap berbagai laporan dan artikel yang relevan digunakan untuk memperkaya analisis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi Ma'had Al-Zaytun dalam pelaksanaan Pilkada. Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pendidikan Politik

Ma'had Al-Zaytun telah mengembangkan program pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran santri mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Dalam konteks demokrasi yang sehat, partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, sangatlah krusial. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi panel, dan pelatihan kepemimpinan yang melibatkan tokoh masyarakat dan alumni yang memiliki pengalaman di bidang politik (Rahim, et.al, 2024). Dengan melibatkan berbagai elemen ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan jaringan yang dapat mendukung santri dalam berpartisipasi secara aktif (Yusuf, 2021).

Sebagai contoh, pada tahun 2022, Ma'had Al-Zaytun menyelenggarakan seminar dengan tema "Peran Pemuda dalam Demokrasi Lokal". Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 500 santri dan masyarakat, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap isu-isu politik lokal. Dalam seminar tersebut, para peserta diberi kesempatan untuk mendengarkan langsung pengalaman dari para tokoh yang telah berkontribusi dalam dunia politik. Hal ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga inspirasi bagi santri untuk berani terlibat dalam proses demokrasi.

Kegiatan ini berhasil memotivasi peserta untuk lebih aktif dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Dengan memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks pemilu, Ma'had Al-Zaytun berupaya menciptakan generasi yang sadar akan pentingnya suara mereka. Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di kalangan santri Ma'had Al-Zaytun meningkat hingga 30% dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, berdasarkan laporan dari KPU tahun 2022. Angka ini mencerminkan

keberhasilan program yang telah dijalankan serta dampak positif yang dirasakan oleh komunitas.

Partisipasi yang meningkat ini juga menunjukkan adanya perubahan sikap di kalangan santri terhadap politik. Banyak di antara mereka yang sebelumnya apatis kini mulai memahami bahwa keterlibatan dalam politik adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini penting untuk membangun kesadaran kolektif di antara generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Dengan demikian, pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penerapan praktis di lapangan.

Dalam analisis lebih lanjut, peningkatan partisipasi pemilih ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti peningkatan akses informasi dan pendidikan yang lebih baik. Di era digital saat ini, santri memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi politik melalui media sosial dan platform online lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami isu-isu yang relevan dan membuat keputusan yang lebih baik saat memilih. Oleh karena itu, penting bagi Ma'had Al-Zaytun untuk terus memanfaatkan teknologi dalam program pendidikan politiknya (Sari, 2021).

Namun, tantangan tetap ada. Meskipun partisipasi meningkat, masih ada segmen santri yang merasa ragu untuk terlibat secara aktif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri atau pengalaman dalam berpolitik. Oleh karena itu, program pelatihan kepemimpinan yang ditawarkan oleh Ma'had Al-Zaytun menjadi sangat penting. Dengan memberikan kesempatan bagi santri untuk berlatih berbicara di depan umum, berdebat, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan lainnya, mereka akan lebih siap untuk terlibat dalam proses politik.

Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan alumni yang berpengalaman di bidang politik juga memberikan dampak positif. Mereka dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada santri yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin. Melalui mentorship ini, santri dapat belajar langsung dari pengalaman orang-orang yang telah berhasil dalam karir politik mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri santri, tetapi juga memberikan mereka gambaran nyata tentang tantangan dan peluang yang ada dalam dunia politik.

Pendidikan politik di Ma'had Al-Zaytun juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan generasi muda. Menurut data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partisipasi pemilih muda di Pilkada 2020 masih tergolong rendah, dengan hanya sekitar 30% yang terlibat. Oleh karena itu, upaya Ma'had Al-Zaytun untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi di kalangan santri sangat relevan dan mendukung tujuan tersebut. Dengan memberikan pendidikan yang tepat, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat (Setiawan, 2022).

Di sisi lain, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi santri untuk berpartisipasi dalam politik. Ini termasuk menciptakan ruang diskusi yang aman dan terbuka, di mana mereka dapat berbagi ide dan pandangan tanpa takut dihakimi. Ma'had Al-Zaytun telah berupaya menciptakan suasana seperti ini melalui diskusi panel dan forum terbuka, di mana santri dapat berinteraksi langsung dengan pembicara dan peserta lainnya. Dengan cara ini, mereka dapat merasa lebih nyaman untuk mengekspresikan pendapat dan berkontribusi dalam diskusi politik.

Dalam kesimpulan, program pendidikan politik yang dikembangkan oleh Ma'had Al-Zaytun menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan partisipasi santri dalam proses demokrasi. Melalui seminar, diskusi panel, dan pelatihan kepemimpinan, santri diberikan kesempatan untuk memahami pentingnya suara mereka dalam Pilkada. Peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan di kalangan santri menunjukkan bahwa upaya ini telah membuahkan hasil. Namun, tantangan tetap ada, dan untuk mencapai tujuan jangka panjang, perlu ada dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, alumni, dan pemerintah. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan generasi muda dapat berperan aktif dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk masyarakat.

2. Fasilitasi Dialog Antar Pemangku Kepentingan

Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh di masyarakat, Ma'had Al-Zaytun berperan sebagai jembatan antara calon pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai

platform yang memungkinkan interaksi antara calon pemimpin daerah dan warga. Melalui forum-forum diskusi yang diadakan secara rutin, Ma'had ini memberikan ruang bagi calon kepala daerah untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada santri dan masyarakat. Kegiatan ini sangat penting, terutama menjelang pemilihan umum, di mana masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang pilihan yang tersedia (Wahyu, 2020).

Contohnya, dalam Pilkada 2023, Ma'had Al-Zaytun mengadakan acara "Dialog Kebangsaan" yang dihadiri oleh berbagai calon kepala daerah dan masyarakat. Acara ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendengarkan secara langsung pandangan dan rencana dari para calon pemimpin. Selain itu, dialog ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga mereka dapat lebih memahami konteks dan substansi dari program-program yang ditawarkan. Dengan cara ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Acara "Dialog Kebangsaan" ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program-program yang ditawarkan, tetapi juga menciptakan suasana demokratis yang sehat. Dalam forum tersebut, para calon pemimpin diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara rinci tentang visi mereka dan bagaimana mereka berencana untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah. Menurut data, 85% peserta merasa lebih memahami pilihan mereka setelah mengikuti acara tersebut (Sumber: Survei Ma'had Al-Zaytun, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa forum semacam ini sangat efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat.

Kegiatan seperti ini juga menunjukkan komitmen Ma'had Al-Zaytun terhadap pendidikan politik yang berkualitas. Dalam era informasi yang cepat dan sering kali membingungkan, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses ke informasi yang jelas dan dapat diandalkan. Dengan menyelenggarakan dialog semacam ini, Ma'had Al-Zaytun berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih teredukasi dan sadar akan hak-hak serta tanggung jawab mereka sebagai warga

negara. Ini sejalan dengan upaya untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan partisipatif di Indonesia.

Lebih jauh lagi, acara-acara seperti ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara calon pemimpin dan masyarakat. Dalam banyak kasus, calon pemimpin mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sebelum pemilihan. Dengan adanya forum-forum ini, calon pemimpin dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan konstituen mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun legitimasi dan dukungan bagi kebijakan yang akan diimplementasikan setelah pemilihan.

Selain itu, dialog yang diadakan oleh Ma'had Al-Zaytun juga menciptakan ruang bagi pertukaran ide dan perspektif yang beragam. Dalam diskusi tersebut, masyarakat tidak hanya mendengarkan visi dari calon pemimpin, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam rencana pembangunan daerah. Dengan cara ini, Ma'had Al-Zaytun berfungsi sebagai medium untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada calon pemimpin, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi santri Ma'had Al-Zaytun. Sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan, mereka perlu dilibatkan dalam proses demokrasi dan memahami pentingnya partisipasi politik. Melalui pengalaman mengikuti dialog dan diskusi, santri dapat belajar tentang dinamika politik dan bagaimana cara berkontribusi dalam masyarakat. Ini sekaligus menjadi pelatihan bagi mereka untuk dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi yang efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum meningkat secara signifikan ketika mereka memiliki akses ke informasi yang jelas dan terpercaya (Sumber: Lembaga Survei Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa upaya Ma'had Al-Zaytun dalam menyelenggarakan forum-forum diskusi seperti "Dialog Kebangsaan"

sangat relevan dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dengan memberikan informasi yang tepat, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi dalam pemilihan umum.

Di samping itu, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan forum-forum ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Kerja sama antara lembaga pendidikan seperti Ma'had Al-Zaytun dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat proses demokrasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Dengan demikian, peran Ma'had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan dialog dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan seperti "Dialog Kebangsaan", Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mendidik santri, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Ini adalah langkah positif menuju terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Oleh karena itu, upaya untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif harus terus dilakukan. Ma'had Al-Zaytun, dengan segala kapasitas dan pengaruhnya, memiliki tanggung jawab untuk terus berinovasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Dengan cara ini, Ma'had Al-Zaytun dapat terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan demokratis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Pengawasan Independen dalam Proses Pilkada

Ma'had Al-Zaytun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keislaman, Ma'had ini tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam aspek sosial dan politik masyarakat. Melalui kehadirannya sebagai pengawas independen, Ma'had Al-Zaytun berupaya memastikan

bahwa proses pemilihan berlangsung dengan baik, tanpa adanya kecurangan yang dapat merusak kepercayaan publik. Hal ini sangat penting mengingat Pilkada merupakan salah satu momen krusial dalam menentukan pemimpin daerah yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat.

Tim pengawas yang dibentuk oleh Ma'had Al-Zaytun terdiri dari santri dan alumni yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Mereka dilatih untuk melakukan pemantauan secara objektif dan profesional, sehingga mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemungutan suara. Dalam konteks ini, pelibatan santri dan alumni tidak hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Dengan pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga proses demokrasi.

Pada Pilkada 2023, tim pengawas Ma'had Al-Zaytun berhasil mengidentifikasi sejumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan. Salah satu pelanggaran yang paling mencolok adalah praktik politik uang yang terjadi di beberapa daerah. Praktik ini, yang sering kali menguntungkan pihak-pihak tertentu, dapat merusak esensi dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya laporan yang disampaikan oleh tim pengawas, pihak berwenang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berdampak nyata pada penegakan hukum dan keadilan dalam proses Pilkada.

Data yang diperoleh dari Laporan Masyarakat Pemantau Pemilu pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada meningkat sebesar 20% setelah adanya pengawasan dari Ma'had Al-Zaytun. Angka ini mencerminkan betapa pentingnya peran pengawasan dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Ketika masyarakat merasa bahwa ada pihak yang mengawasi dan menjaga keadilan, mereka akan lebih terdorong untuk menggunakan hak

suara mereka. Ini adalah langkah positif menuju demokrasi yang lebih sehat dan transparan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun juga mencerminkan komitmen lembaga ini untuk mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa pengawasan bukan hanya tugas yang dilakukan selama masa pemilihan, tetapi juga merupakan proses berkelanjutan yang harus menjadi bagian dari budaya politik masyarakat. Dengan melibatkan generasi muda dalam proses ini, Ma'had Al-Zaytun berkontribusi pada pembentukan karakter dan kesadaran politik yang lebih baik di kalangan santri dan alumni. Hal ini diharapkan dapat menciptakan generasi pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap isu-isu masyarakat di masa depan.

Dalam analisis lebih lanjut, keberhasilan Ma'had Al-Zaytun dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat dilihat sebagai model bagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan. Ini juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pengawasan pemilu perlu terus ditingkatkan.

Namun, tantangan tetap ada dalam proses pengawasan ini. Meskipun tim pengawas Ma'had Al-Zaytun telah melakukan tugasnya dengan baik, masih terdapat berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan. Misalnya, tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan oleh pengawasan tersebut dapat menghambat upaya untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Ma'had Al-Zaytun untuk tetap bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Kemandirian dalam melakukan pengawasan adalah kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Melihat ke depan, Ma'had Al-Zaytun diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas tim pengawasnya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif mengenai aspek-aspek hukum dan etika dalam pemilihan

umum. Dengan demikian, para pengawas tidak hanya memiliki pengetahuan tentang proses pemilu, tetapi juga memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas. Selain itu, pelatihan ini dapat mencakup strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama proses pengawasan, sehingga mereka dapat bertindak dengan lebih percaya diri dan efektif.

Keterlibatan Ma'had Al-Zaytun dalam pengawasan Pilkada juga dapat menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga lain untuk melakukan hal serupa. Dengan mengajak lebih banyak organisasi dan komunitas untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, diharapkan akan tercipta jaringan pengawas yang lebih luas dan solid. Hal ini tidak hanya akan memperkuat pengawasan itu sendiri, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ketika masyarakat bersatu untuk menjaga keadilan dan transparansi, maka akan ada harapan yang lebih besar untuk menciptakan sistem politik yang lebih baik.

Dalam kesimpulannya, peran Ma'had Al-Zaytun sebagai pengawas independen dalam pelaksanaan Pilkada sangatlah krusial. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh tim santri dan alumni, Ma'had ini berhasil menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih adil dan transparan. Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada merupakan bukti nyata dari efektivitas pengawasan tersebut. Dengan terus berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berkontribusi pada pelaksanaan Pilkada yang lebih baik, tetapi juga membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya demokrasi. Oleh karena itu, upaya pengawasan ini perlu dilanjutkan dan diperluas untuk memastikan bahwa setiap suara dihargai dan setiap proses pemilihan berlangsung dengan semestinya.

4. Kontribusi dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, Ma'had Al-Zaytun berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, penting bagi setiap individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat tidak

hanya berpengaruh pada kualitas pemilihan umum, tetapi juga pada penguatan demokrasi itu sendiri. Dengan pemahaman yang baik mengenai proses politik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berlandaskan informasi yang akurat.

Program-program yang mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih telah berhasil menarik perhatian banyak orang. Salah satu contoh yang menonjol adalah kampanye "Satu Suara untuk Perubahan" yang diluncurkan pada tahun 2021. Kampanye ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang dewasa, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang inklusif, Ma'had Al-Zaytun berhasil menciptakan ruang dialog yang konstruktif, di mana masyarakat dapat berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai isu-isu politik terkini.

Kampanye ini tidak hanya memberikan informasi mengenai pentingnya memilih, tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik. Dalam pelaksanaannya, Ma'had Al-Zaytun menyelenggarakan berbagai seminar dan workshop yang menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai latar belakang. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan wawasan tentang mekanisme pemilihan, tetapi juga membahas isu-isu sosial yang relevan, sehingga masyarakat merasa lebih terhubung dengan proses politik yang ada. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa setiap suara memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan daerah dan negara.

Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di daerah sekitar Ma'had meningkat hingga 40% dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya (Sumber: KPU Provinsi, 2021). Angka ini mencerminkan keberhasilan kampanye dalam membangkitkan minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya peran mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui pilihan yang mereka ambil. Ketika masyarakat berpartisipasi secara aktif, maka legitimasi pemimpin yang terpilih juga akan semakin kuat.

Kenaikan partisipasi ini tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan, tetapi juga pada kualitas demokrasi itu sendiri.

Masyarakat yang aktif berpartisipasi cenderung lebih kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin mereka. Mereka menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih berani untuk menyuarakan pendapat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan transparan. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu politik.

Selain itu, keberhasilan kampanye ini juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Banyak peserta yang mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri untuk memberikan suara setelah mengikuti program-program edukatif tersebut. Ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang tepat dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Dengan meningkatnya rasa percaya diri ini, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemimpin yang mereka pilih dan menyuarakan aspirasi mereka.

Namun, tantangan tetap ada. Meskipun partisipasi pemilih meningkat, masih terdapat segmen-segmen masyarakat yang kurang terjangkau oleh program-program tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses informasi atau keterbatasan waktu bagi mereka yang bekerja. Oleh karena itu, ke depannya, Ma'had Al-Zaytun perlu mengembangkan strategi yang lebih inklusif untuk menjangkau kelompok-kelompok ini. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi dan mengadakan forum diskusi secara daring, sehingga masyarakat yang tidak bisa hadir secara fisik tetap dapat berpartisipasi (Lestari, 2023).

Selain itu, penting juga untuk menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, dalam upaya meningkatkan kesadaran politik. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan kampanye dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan relevan. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat gerakan masyarakat untuk lebih

aktif dalam menentukan arah kebijakan yang menguntungkan bagi mereka.

Keberhasilan Ma'had Al-Zaytun dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat juga menunjukkan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan. Program-program yang bersifat temporer mungkin dapat memberikan dampak positif sesaat, tetapi untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, diperlukan upaya yang konsisten. Oleh karena itu, Ma'had perlu merancang kurikulum pendidikan yang tidak hanya fokus pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang komprehensif ini akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab.

Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga warga negara yang aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang muncul di masa depan dan dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kesadaran politik yang tinggi akan mendorong partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pengawasan kebijakan publik, advokasi hak asasi manusia, dan partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Ma'had Al-Zaytun perlu terus berinovasi dalam program-program edukasi yang ditawarkan. Melalui pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Ma'had dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk belajar dan berkontribusi. Dengan demikian, kesadaran politik yang tinggi tidak hanya akan menjadi milik segelintir orang, tetapi akan menyebar luas di kalangan masyarakat.

Dengan semua upaya ini, Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk menjadi pionir dalam pendidikan politik di Indonesia. Melalui program-program yang inovatif dan inklusif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik, serta memperkuat fondasi demokrasi yang ada. Akhirnya, kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat akan menjadi kunci untuk

menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan bagi semua.

5. Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Meskipun Ma'had Al-Zaytun telah menunjukkan peran yang signifikan dalam pelaksanaan Pilkada, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai integritas proses pemilihan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2022, sekitar 30% responden mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan yang berlangsung, menunjukkan perlunya langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, Ma'had perlu terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses pemilihan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.

Transparansi dalam proses pemilihan sangat penting untuk dapat membangun kepercayaan. Dalam konteks ini, Ma'had Al-Zaytun dapat menerapkan berbagai metode komunikasi yang efektif, seperti forum diskusi dan penyampaian laporan berkala kepada publik. Dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Selain itu, Ma'had juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan dari masyarakat, sehingga menciptakan ruang dialog yang konstruktif.

Di sisi lain, peluang untuk berkontribusi lebih besar dalam proses demokrasi juga terbuka lebar, terutama dengan semakin banyaknya santri yang terlibat dalam politik praktis. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat peningkatan jumlah santri yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, baik sebagai calon legislatif maupun sebagai aktivis politik. Menurut data dari Kementerian Agama, jumlah santri yang aktif dalam organisasi politik meningkat sebesar 20% sejak tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun memiliki potensi besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin

masa depan yang berintegritas dan memiliki visi yang jelas untuk pembangunan bangsa.

Dengan memanfaatkan jaringan alumni dan kolaborasi dengan lembaga lain, Ma'had Al-Zaytun dapat menjadi pionir dalam pendidikan politik di Indonesia. Jaringan alumni yang luas dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia politik, serta untuk membangun jejaring yang kuat di kalangan para santri. Melalui pelatihan dan seminar yang melibatkan tokoh-tokoh politik dan akademisi, Ma'had dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Kegiatan semacam ini tidak hanya akan memperluas pengetahuan para santri, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka untuk terjun ke dunia politik.

Pendidikan politik yang komprehensif juga harus mencakup pembekalan mengenai etika dan integritas dalam berpolitik. Mengingat banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Indonesia, adalah penting bagi Ma'had untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada para santri (Rahman, 2022). Dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab sosial dan etika politik, Ma'had dapat membantu menciptakan generasi pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua KPU yang menyebutkan bahwa "integritas pemimpin adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi."

Selain itu, Ma'had juga perlu membangun kemitraan strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pendidikan politik dan pengawasan pemilu. Melalui kolaborasi ini, Ma'had dapat berperan aktif dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Misalnya, bersama dengan lembaga swadaya masyarakat, Ma'had dapat menyelenggarakan kampanye penyuluhan yang menekankan pentingnya hak suara dan partisipasi aktif dalam pemilu. Kegiatan ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Keterlibatan Ma'had dalam pendidikan politik juga dapat memperkuat posisi santri dalam masyarakat. Dengan memberikan bekal pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai, santri akan lebih siap untuk

menghadapi tantangan di dunia politik. Mereka akan mampu memahami dinamika politik yang ada, serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi Ma'had untuk terus mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk materi tentang kepemimpinan, manajemen organisasi, dan strategi advokasi (Lestari, 2023).

Dalam menghadapi tantangan dan peluang ini, Ma'had Al-Zaytun juga harus memperhatikan aspek inklusivitas dalam pendidikan politik. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua santri, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, Ma'had dapat memastikan bahwa setiap santri memiliki suara dan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses demokrasi. Ini juga akan membantu membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di antara para santri, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Keberhasilan Ma'had Al-Zaytun dalam melaksanakan peran ini akan sangat bergantung pada dukungan dan komitmen dari semua pihak, termasuk pengurus Ma'had, para pengajar, dan santri itu sendiri. Setiap elemen dalam organisasi ini harus memiliki visi yang sama mengenai pentingnya pendidikan politik dan keterlibatan dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi Ma'had untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, Ma'had dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan memastikan bahwa kontribusinya tetap relevan dan berdampak.

Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pendidikan politik yang berkualitas, pengembangan jaringan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Ma'had dapat membantu menciptakan generasi pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Ini bukan hanya tanggung jawab Ma'had, tetapi juga merupakan kontribusi penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Di tengah tantangan yang ada, upaya yang dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun akan menjadi langkah strategis dalam

memperkuat demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Ma'had Al-Zaytun memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Melalui pendidikan politik, fasilitasi dialog, pengawasan independen, dan peningkatan kesadaran masyarakat, Ma'had ini telah berkontribusi dalam menciptakan proses Pilkada yang lebih demokratis dan berintegritas. Namun, tantangan masih ada dan perlu diatasi agar peran ini dapat terus berkembang di masa depan.

B. Saran

Diperlukan upaya yang lebih sistematis dari Ma'had Al-Zaytun untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Rekomendasi ini mencakup pengembangan program-program pendidikan politik yang lebih komprehensif, peningkatan kerjasama dengan lembaga lain, serta penguatan kapasitas pengawas pemilu di kalangan santri.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, R. (2021). Pemilu dan Pendidikan: Sinergi untuk Demokrasi yang Berkualitas. *Jurnal Politik dan Pendidikan*, 2(1), 20-35.
- Fauzi, M. (2019). Dampak Pendidikan Agama terhadap Partisipasi Politik Pemuda. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(4), 150-162.
- Hidayah, N. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45-60.
- KPU Provinsi (2021). Laporan Partisipasi Pemilih.
- Kurniawan, B. (2023). Keterlibatan Santri dalam Politik Lokal: Studi Kasus Ma'had Al-Zaytun. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(3), 201-215.
- Laporan KPU (2022). Laporan Hasil Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum.
- Laporan Masyarakat Pemantau Pemilu (2023). Laporan Pengawasan Pilkada 2023.

- Lestari, A. (2023). Strategi Ma'had Al-Zaytun dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Santri. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan*, 6(2), 110-125.
- Norris, P. (2011). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge University Press.
- Rahim, A., Zahro, N. A., Al-Kautsar, M. B., Saputra, W., & Nabilah, M. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2872-2877.
- Rahman, A. (2022). Ma'had Al-Zaytun: Tradisi dan Modernitas dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 8(1), 78-90.
- Sari, R. D. (2021). Peran Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 123-134.
- Setiawan, J. (2022). Analisis Peran Ma'had dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 90-102.
- Survei Ma'had Al-Zaytun (2023). Hasil Survei Partisipasi Pemilih.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Wahyu, S. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Mendorong Partisipasi Politik di Era Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Politik*, 4(3), 55-70.
- Yusuf, I. (2021). Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat: Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 30-44.